



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2011  
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2011

PETA RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

87



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### INDEKS PETA

	26 - 3 - 21-2	26 - 3 - 22-1	26 - 3 - 22-2
	26 - 3 - 16-4	26 - 3 - 17-3	26 - 3 - 17-4
26 - 3 - 16-1	26 - 3 - 16-2	26 - 3 - 17-1	26 - 3 - 17-2
26 - 3 - 11-3	26 - 3 - 11-4	26 - 3 - 12-3	26 - 3 - 12-4
26 - 3 - 10-1	26 - 3 - 11-2	26 - 3 - 12-1	26 - 3 - 12-2
26 - 3 - 09-3	26 - 3 - 06-4	26 - 3 - 07-3	26 - 3 - 07-4
26 - 3 - 06-1	26 - 3 - 07-2	26 - 3 - 07-1	26 - 3 - 07-2
26 - 3 - 01-3	26 - 3 - 01-4	26 - 3 - 02-3	26 - 3 - 02-4
26 - 3 - 01-1	26 - 3 - 01-2	26 - 3 - 02-1	26 - 3 - 02-2
26 - 1 - 21-3	26 - 1 - 21-4	26 - 1 - 22-1	26 - 1 - 22-4
26 - 1 - 21-1	26 - 1 - 21-2	26 - 1 - 22-1	
26 - 1 - 16-3	26 - 1 - 16-4	26 - 1 - 17-3	
26 - 1 - 16-1	26 - 1 - 16-2	26 - 1 - 17-1	
	26 - 1 - 11-4	26 - 1 - 12-3	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

### KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



#### IBUKOTA

- ⊙ Ibukota Provinsi
- ⊙ Ibukota Kabupaten/Kota

#### BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Wilayah Kawasan Perkotaan Mebidangro

#### PERAIRAN

- Garis Pantai
- Sungai

#### KAWASAN LINDUNG

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Resapan Air

Kawasan Perlindungan Setempat

- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Kawasan Sekitar Waduk
- KTH Kota

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

- Kawasan Suaka Margasatwa
- Kawasan Taman Hutan Raya
- Kawasan Taman Wisata Alam
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau
- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan Rawan Bencana Alam

- Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan Lindung Lainnya

- Kawasan Koridor bagi Jenis Satwa yang Dilindungi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

### KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



#### KAWASAN BUDI DAYA



- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi
- Kawasan peruntukan pemerintahan provinsi
- Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional
- Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi
- Kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala internasional, nasional, regional, dan lokal
- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal
- Kawasan peruntukan industri kreatif
- Kawasan peruntukan industri manufaktur
- Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional
- Kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional
- Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
- Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata
- Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya



- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang
- Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional
- Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi
- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal
- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal
- Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah
- Kawasan peruntukan kegiatan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan
- Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional
- Kawasan peruntukan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional
- Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara
- Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata
- Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO

### KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



B3

- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah
- Kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional
- Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala lokal
- Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala lokal
- Kawasan peruntukan industri manufaktur
- Kawasan peruntukan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan
- Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional
- Kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional
- Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara
- Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata
- Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya

B4

- Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah
- Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata
- Kawasan peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan
- Kawasan peruntukan kegiatan hortikultura
- Kawasan peruntukan kegiatan perkebunan
- Kawasan peruntukan kegiatan peternakan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA






## PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO








### KETERANGAN GAMBAR

SKALA 1 : 50.000



#### KAWASAN BUDI DAYA

- |   |  |
|---|--|
|  | B5 Kawasan peruntukan pertanian dengan irigasi teknis  |
|  | - Kawasan peruntukan budi daya perikanan<br>- Kawasan peruntukan kegiatan transportasi laut, dan<br>- Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata |
|  | B7 Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas  |
|  | B7 Kawasan peruntukan hutan produksi tetap   |
|  | B7 Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi   |

- |   |  |
|---|--|
|  | Zona L1 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai Zona B4   |
|  | Zona L1 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi tetap pada Zona B7                 |
|  | Zona L1 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi pada Zona B7 |
|  | Zona B4 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan lindung pada Zona L1                        |
|  | Zona B4 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi tetap pada Zona B7                 |
|  | Zona B4 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas pada Zona B7              |
|  | Zona B7 yang menurut penunjukan kawasan hutan masih ditetapkan sebagai hutan lindung pada Zona L1                        |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 21 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 22 - 1

98°42'00" 98°43'00" 98°44'00" 98°45'00" 98°46'00" 98°47'00" 98°48'00" 98°49'00"

0°00'00"

0°00'00"

0°00'00"

0°00'00"

*S E L A T M A L A K A*

**B6**

Tp. Nipoh Lingsen

Kec. Labuhan Deli

KABUPATEN DELI SERDANG

L3Kec. Hamparan Perak







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**H - 26 - 3 - 22 - 2**

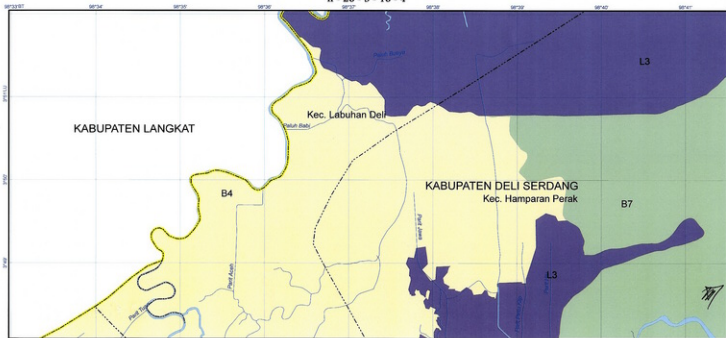
*S E L A T M A L A K A*

**B6**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

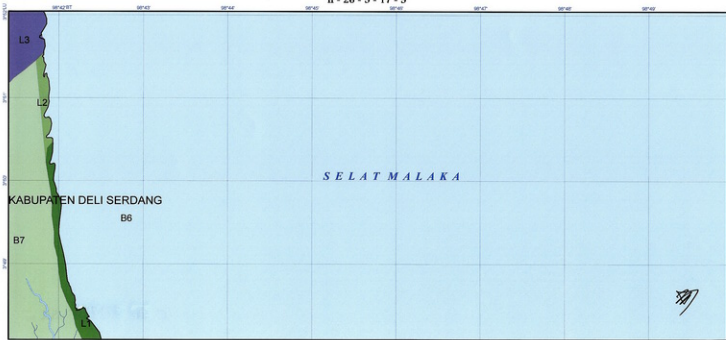
II - 26 - 3 - 16 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 17 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 17 - 4

*SELAT MALAKA*

B6



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 16 - 1

KABUPATEN LANGKAT

KABUPATEN DELI SERDANG

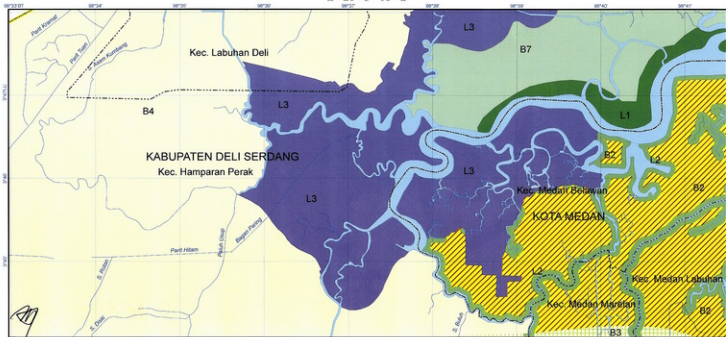
Kec. Hamparan Perak  
B4

Post. Tani



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

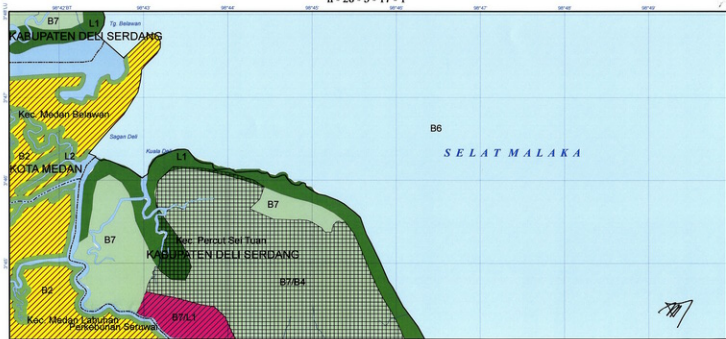
II - 26 - 3 - 16 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 17 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 17 - 2

*SELAT MALAKA*

B6

*AM*





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 11 - 3

KABUPATEN LANGKAT

KABUPATEN DELI SERDANG

Kec. Hamparan Perak

B2

B4

Kec. Binjai Utara  
KOTA BINJAL

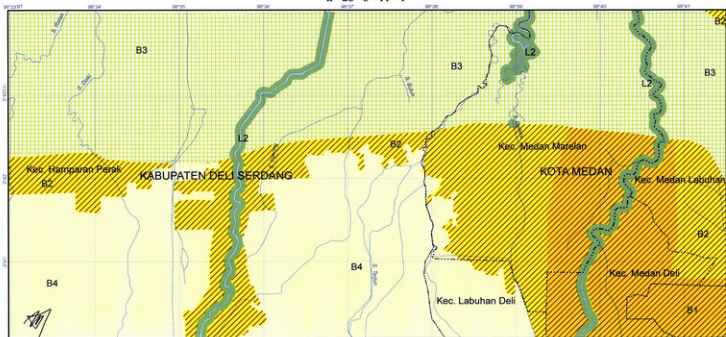
B3

S. Negeri



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

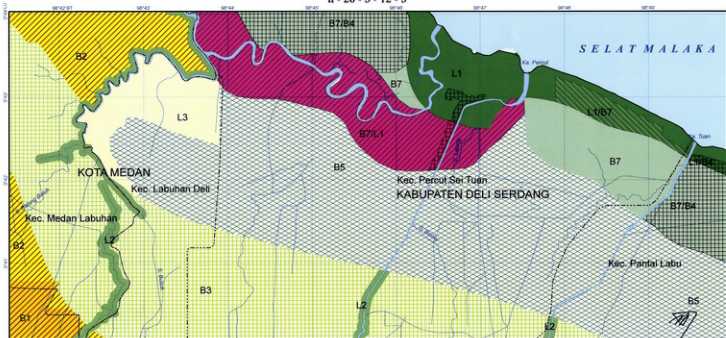
II - 26 - 3 - 11 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

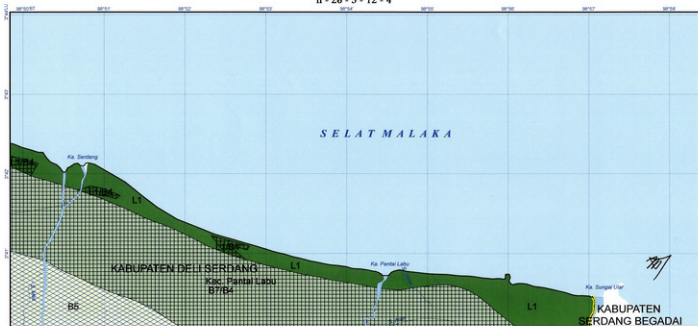
II - 26 - 3 - 12 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

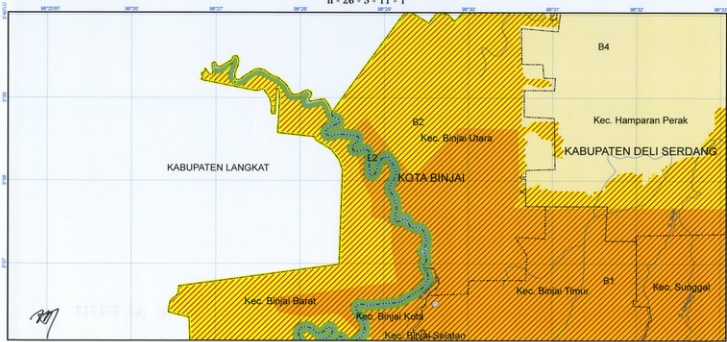
II - 26 - 3 - 12 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

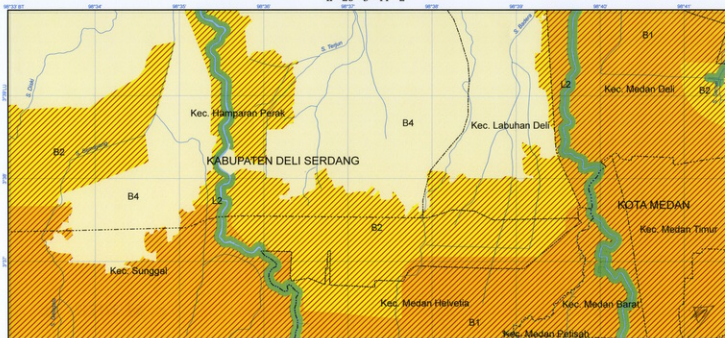
II - 26 - 3 - 11 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

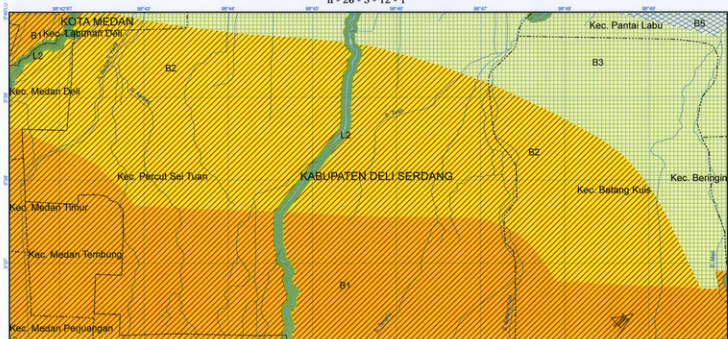
II - 26 - 3 - 11 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 12 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 12 - 2

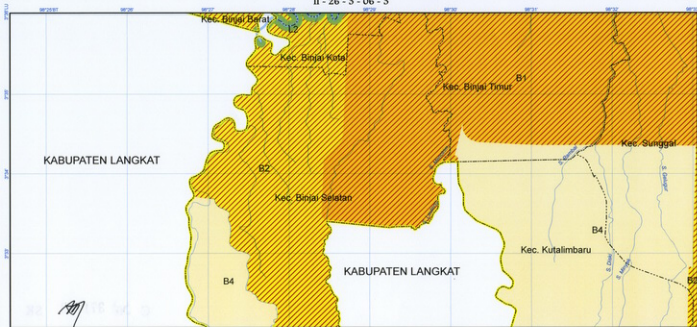






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

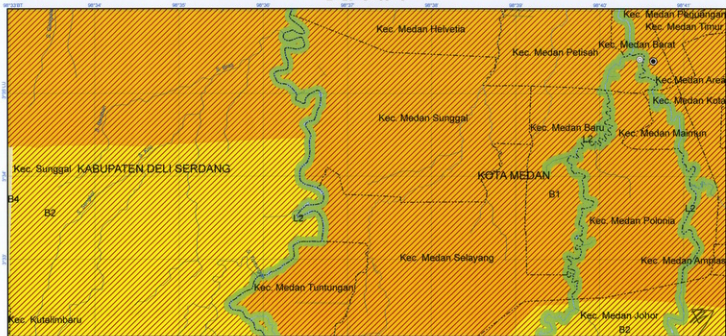
II - 26 - 3 - 06 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

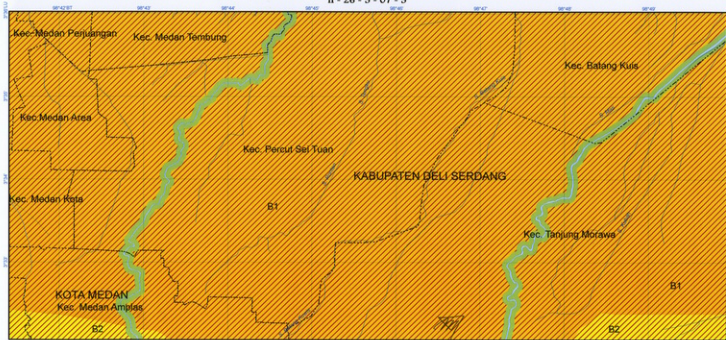
II - 26 - 3 - 06 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

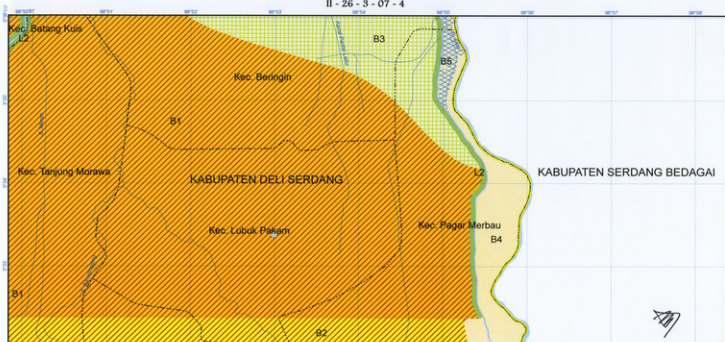
II - 26 - 3 - 07 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 07 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 06 - 1

B4 KOTA BINJAI

Kec. Binjai Selatan

KABUPATEN LANGKAT

KABUPATEN DELI SERDANG

Kec. Sunggal

B4

Kec. Kutalimbaru

B5

Kec. Pancur Batu

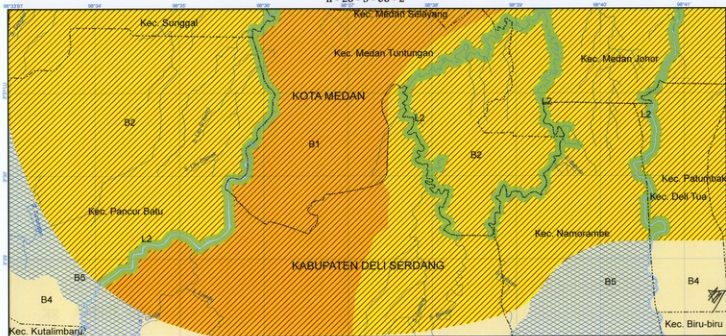
B4

107



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 06 - 2

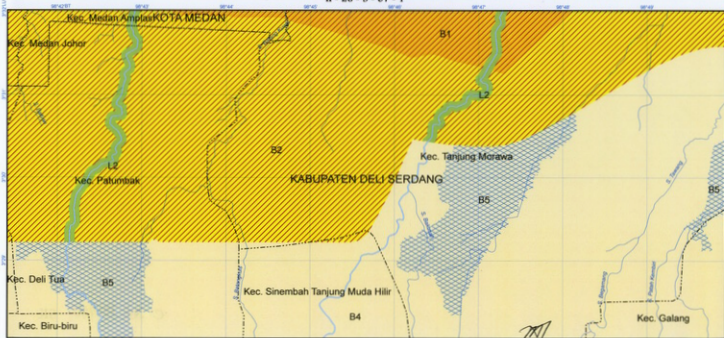






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

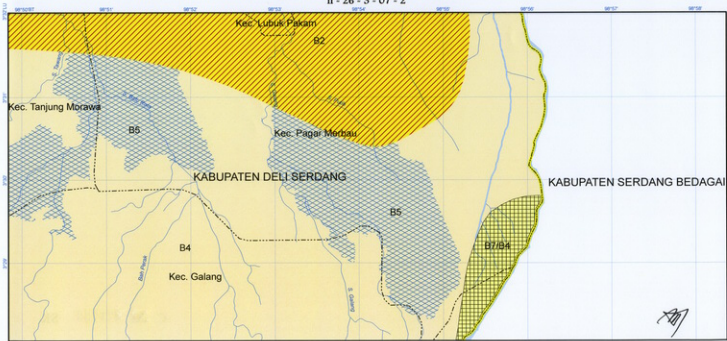
II - 26 - 3 - 07 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 07 - 2







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 01 - 3

KABUPATEN LANGKAT

KABUPATEN DELI SERDANG

Kec. Kutalimbaru

B4

B5

B7/B4

87

Handwritten signature



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 01 - 4







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

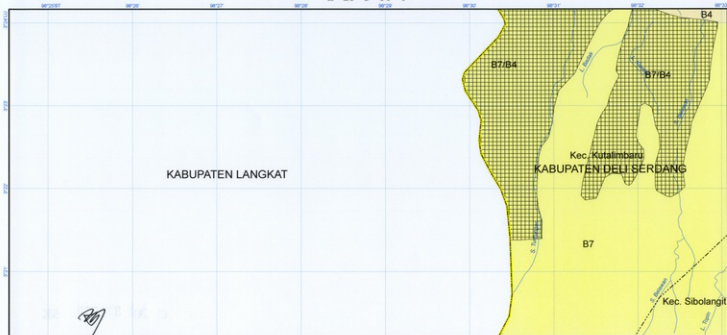
II - 26 - 3 - 02 - 4





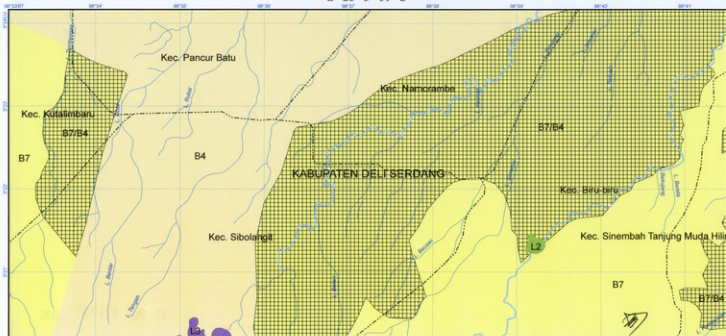
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 3 - 01 - 1





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 3 - 01 - 2







PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

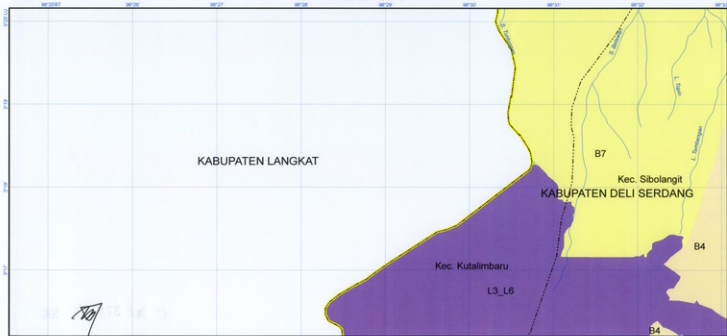
II - 26 - 3 - 02 - 2





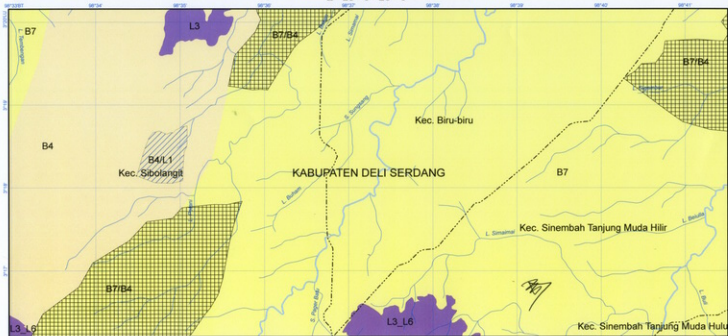


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 21 - 3



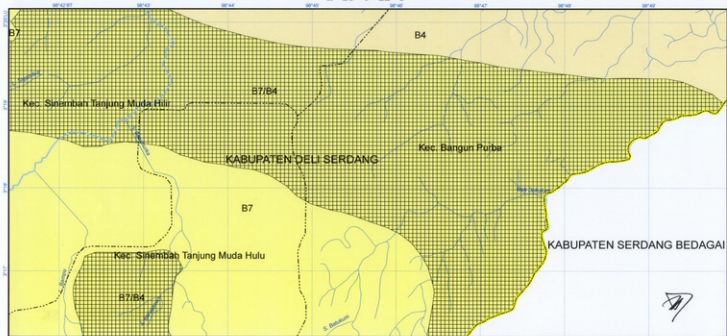


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 21 - 4



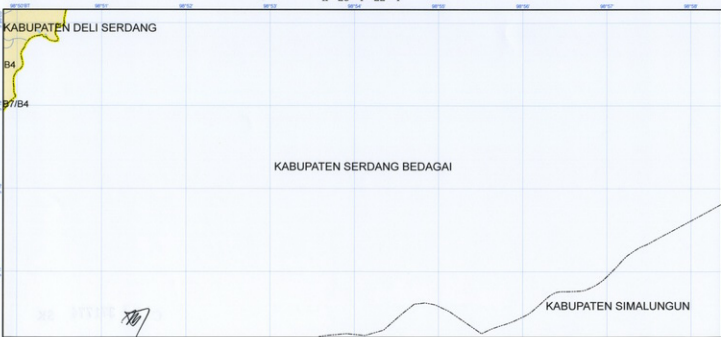


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 22 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 22 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 1 - 21 - 1

KABUPATEN LANGKAT

B4

L3\_L6

Kec. Sibolangit

B7/L1

B7/B4

KABUPATEN DELI SERDANG

L4

Kec. Kutalimbaru

KABUPATEN KARO

B4

Kec. Merdeka

Kec. Borastagi

KABUPATEN KARO

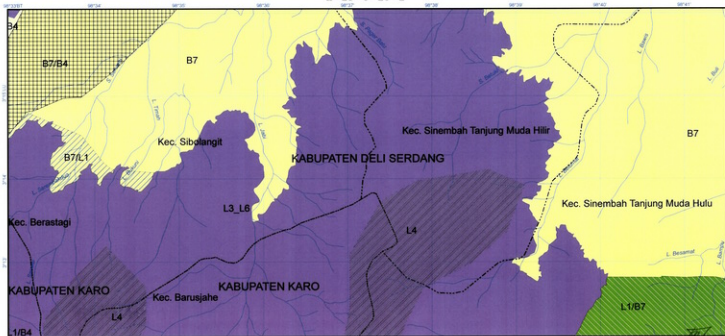
B7/B4

L1/B4

Kec. Dolat Rakyat

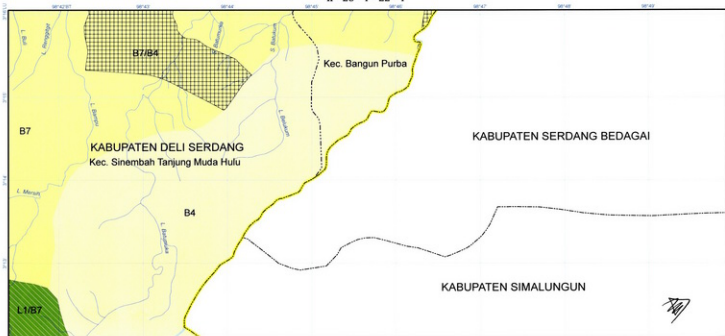


PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 21 - 2





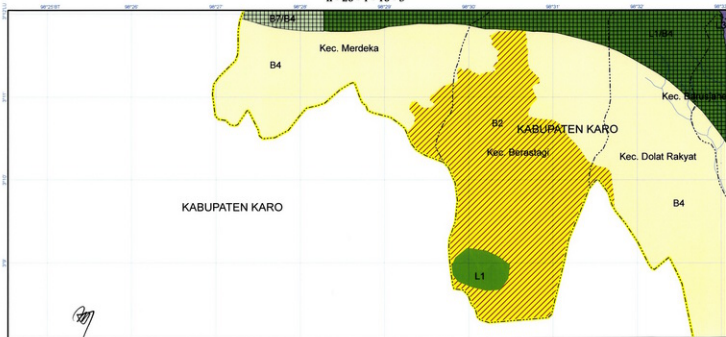
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
**II - 26 - 1 - 22 - 1**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

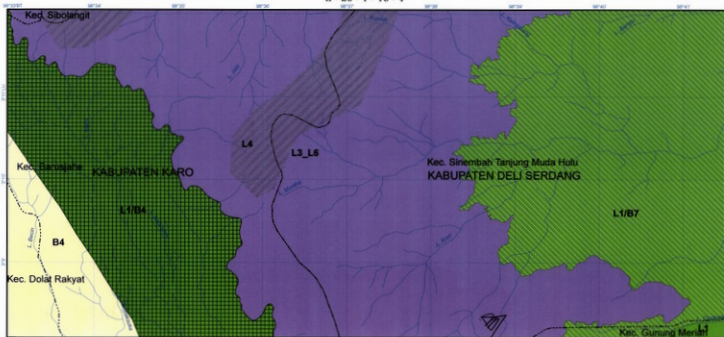
II - 26 - 1 - 16 - 3







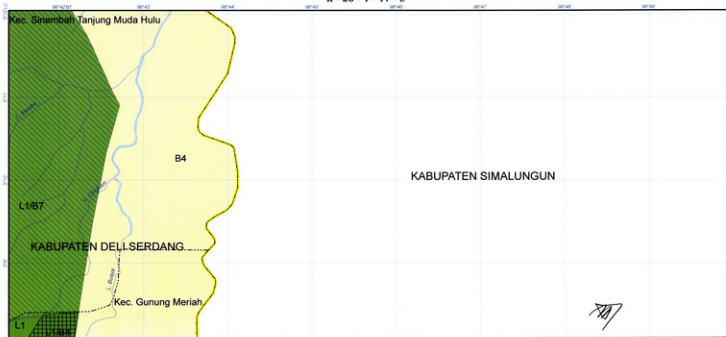
PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 16 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

11-26-1-17-3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 1 - 16 - 1

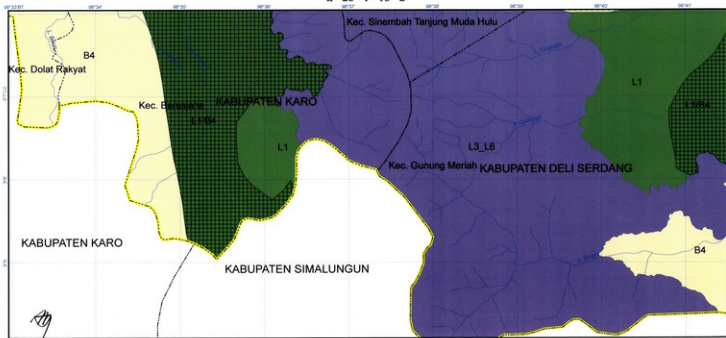
Kec. Dolat Rakyat

KABUPATEN KARO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 1 - 16 - 2





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
**II - 26 - 1 - 17 - 1**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II - 26 - 1 - 11 - 4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 1 - 12 - 3





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II - 26 - 1 - 12 - 3



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,



Retno Pridji Budi Astuti